

CPMI-IOSCO PFMI Executive Summary



Document Reference

Version	2
Issuance Date	November 18 th , 2021

1.1 Table of Contents

About KSEI	3
Principle 1: Legal	7
Principle 2: Governance	9
Principle 3: Framework for the comprehensive management of risks.....	12
Principle 4: Credit Risk.....	14
Principle 5: Collateral	15
Principle 6: Margin	16
Principle 7:Liquidity Risk	17
Principle 8: Settlement Finality	19
Principle 9: Money Settlement	20
Principle 10: Physical Securities	21
Principle 11: Central Securities Depositories	22
Principle 12: Exchange-of-value Settlement System	23
Principle 13: Participant-default Rules and Procedures	23
Principle 14: Segregation and Portability.....	23
Principle 15: General Business Risks	23
Principle 16: Custody and Investment Risks	23
Principle 17: Operational Risk	23
Principle 18: Access and participation requirements	23
Principle 19: Tiered Participation	23
Principle 20: FMI Links.....	23
Principle 21: Efficiency and Effectiveness	23
Principle 22: Communication Procedures and Standards	23
Principle 23: Disclosure of Rules, Key Procedures and Market Data.....	23
Principle 24: Disclosure of market data by trade repositories	231

1.2 About KSEI

<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), also known as the Indonesia Central Securities Depository, provides depository and settlement services for equities and debt securities in Indonesia. KSEI is a private non-profit organisation whose shareholders (as of October 28th, 2021) consist of 23 securities companies (28.5%), 8 custodian banks (35%), 2 registrars (2%), the Indonesia Stock Exchange (IDX) (22%) and the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI) (12.5%).</p> <p>KSEI was established in December 1997 under the Capital Market Law and Regulation and the Limited Liability Company Law. It was granted an operating license in November 1998 by the Indonesia Financial Services Authority namely Otoritas Jasa Keuangan (OJK), which previously the BAPEPAM-LK, who also has to approve KSEI's regulations.</p> <p>Initially, KSEI started operations by managing settlement securities in script form. In January 1998 KSEI took over a similar function from PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI). In July 2000, KSEI, along with the stock exchange and KPEI, started implementing scripless trading and central depository activities in the Indonesian capital market.</p> <p>KSEI was appointed as a sub-registry of Bank Indonesia (BI) since 2006. As such, KSEI is able to facilitate the settlement of government bond (G-Bond) transactions, and furthermore in 2019, KSEI fully conducts the fund settlement in IDR denomination through Central Bank Money.</p>	<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menyediakan layanan penyimpanan dan penyelesaian efek bersifat ekuitas dan utang di Indonesia. KSEI adalah organisasi nirlaba swasta yang pemegang sahamnya (per 28 Oktober 2021) terdiri dari 23 perusahaan efek (28,5%), 8 bank kustodian (35%), 2 BAE (2%), Bursa Efek Indonesia (BEI) (22%) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) (12,5%).</p> <p>KSEI didirikan pada Desember 1997 berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Diberi izin operasi pada November 1998 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sebelumnya BAPEPAM-LK, yang memberikan persetujuan terhadap peraturan yang dikeluarkan KSEI.</p> <p>Awalnya, KSEI mulai beroperasi dengan mengelola penyelesaian Efek dalam bentuk warkat. Pada Januari 1998, KSEI mengambil alih fungsi serupa dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI). Pada Juli 2000, KSEI bersama dengan bursa dan KPEI mulai menerapkan kegiatan <i>scripless trading</i> dan penyimpanan sentral di pasar modal Indonesia.</p> <p>KSEI ditunjuk sebagai sub-registry Bank Indonesia (BI) sejak 2006. Dengan demikian, KSEI mulai memfasilitasi penyelesaian transaksi obligasi pemerintah (G-Bond), dan selanjutnya di tahun 2019, KSEI sepenuhnya melakukan penyelesaian transaksi dalam mata uang Rupiah melalui Bank Sentral.</p>
---	---

On January 18th, 2001, KSEI joined the Association of National Numbering Agencies (ANNA) and became the only institution in Indonesia authorized to issue International Securities Identification Number (ISIN) codes. Furthermore, KSEI also became a member of The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) on September 6th, 2008.

In 2009, KSEI implemented AKSes to enable investors to monitor their portfolio balances and movements, which is deposited and settled in KSEI by their custodians. In 2016, KSEI implemented S-INVEST, which facilitated transactions and reportings for mutual funds industry. Furthermore, in 2021, KSEI succeeded in implemented full features of EASY.KSEI which enables shareholders to electronically assign the power of attorney to appoint representatives to attend the General Meeting of Shareholders (GMS) and to vote on their behalf. The system enables issuers to have online GMS, which have livestreaming features.

KSEI always maintained ISO 9001:2015 and 27001:2013 certifications for service quality and information security, respectively throughout the years.

Securities transaction settlement is undertaken using an electronic book-entry system known as Central Depository Book Entry Settlement System (C-BEST). The system processes transactions on a simultaneous, irrevocable and real-time basis. Stock exchange transactions are settled on a T+2 basis and are subject to the netting of both cash and securities at the central

Pada 18 Januari 2001, KSEI bergabung dengan *Association of National Numbering Agencies* (ANNA) dan menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang menerbitkan kode *International Securities Identification Number* (ISIN). Selanjutnya, KSEI juga menjadi anggota *The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) pada 6 September 2008.

Pada tahun 2009, KSEI menerapkan AKSes untuk memungkinkan investor memantau saldo dan pergerakan portofolio mereka, yang disimpan dan diselesaikan di KSEI oleh bank kustodiannya. Pada tahun 2016, KSEI mengimplementasikan S-INVEST yang memfasilitasi transaksi dan pelaporan untuk industri reksa dana. Selanjutnya, pada tahun 2021, KSEI berhasil mengimplementasikan seluruh fitur EASY.KSEI yang memungkinkan pemegang saham secara elektronik memberikan kuasa untuk menunjuk perwakilan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan suara atas nama mereka. Sistem ini memungkinkan emiten menyelenggarakan RUPS *online* yang memiliki fitur *live streaming*.

KSEI selalu mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan 27001:2013 masing-masing untuk manajemen mutu dan keamanan informasi.

Penyelesaian transaksi efek dilakukan dengan menggunakan sistem pemindahbukuan secara elektronik yang dikenal dengan *Central Depository Book Entry Settlement System* (C-BEST). Sistem memproses transaksi secara simultan, tidak dapat dibatalkan, dan *realtime*. Transaksi bursa diselesaikan secara T+2 dan dikenakan *netting* dari sisi dana maupun efek oleh *central counterparty*: KPEI.

<p>counterparty: KPEI. Off-exchange transactions which include all securities settle on a gross basis on a date agreed between the parties. FOP settlement is possible for all securities deposited in KSEI with prerequisite of providing settlement reasons as one of matching criteria. KSEI settles those transactions either in IDR or USD denomination. Settlement in IDR will be conducted through central bank, while for settlement in USD, KSEI appointed one particular commercial bank as the payment bank.</p>	<p>Transaksi di luar bursa yang mencakup semua sekuritas diselesaikan secara bruto pada tanggal yang disepakati antara para pihak. Setelmen FOP dimungkinkan untuk semua efek yang disimpan di KSEI. KSEI menyelesaikan transaksi tersebut baik dalam mata uang Rupiah maupun USD. Penyelesaian transaksi dalam mata uang Rupiah akan dilakukan melalui bank sentral, sedangkan untuk setelmen dalam mata uang USD, KSEI menunjuk satu bank umum tertentu sebagai bank pembayaran.</p>
<p>Securities in KSEI are held in dematerialised and registered form making the vaults unnecessary for safekeeping. Asset segregation is at beneficial owner level for settlement, despite omnibus accounts are allowed, ensuring that securities are not commingled with others during settlement processes. Securities are held in sub-accounts under the main-account, which is managed by KSEI's participants. Under POJK, KSEI's participants have the duties to mirror the securities accounts opened in KSEI with their records.</p>	<p>Efek di KSEI disimpan dalam bentuk <i>scripless</i> dan terdaftar sehingga tidak perlu adanya brankas. Pemisahan aset berada pada tingkat pemilik manfaat untuk penyelesaian, meskipun akun omnibus diperbolehkan, memastikan bahwa efek tidak bercampur dengan yang lain selama proses penyelesaian. Efek disimpan dalam sub rekening di bawah rekening utama yang dikelola oleh peserta KSEI. Berdasarkan POJK, peserta KSEI memiliki kewajiban untuk mencerminkan rekening efek yang dibuka di KSEI dengan catatannya.</p>
<p>In terms of asset servicing, issuers must notify KSEI regarding their GMS through eASY.KSEI and report their corporate action plans through media, letters, and IDXnet.</p>	<p>Dalam hal pengelolaan aset, emiten wajib memberitahukan kepada KSEI mengenai RUPS-nya melalui eASY.KSEI dan melaporkan rencana aksi korporasinya melalui media, surat, dan IDXnet.</p>
<p>For voluntary corporate actions (i.e. subscriptions of rights issue, or warrants), it is mandatory for the instructions to be routed through the depository via C-BEST.</p>	<p>Untuk aksi korporasi sukarela (yaitu berlangganan <i>rights issue</i>, atau waran), instruksi wajib diteruskan melalui penyimpanan melalui C-BEST.</p>
<p>KSEI does notify all participants that a corporate action has been executed or distributed. KSEI provides full corporate</p>	<p>KSEI tidak memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa telah dilakukan aksi korporasi atau didistribusikan. KSEI menyediakan layanan aksi korporasi lengkap, termasuk</p>

<p>actions services, including same-day confirmations of corporate actions results.</p> <p>On record date, C-BEST will calculate the proceeds gross amount, tax amount (if any), and net amount (if any) as well as generate the report for the issuer, transfer agent, brokers and custodian bank. In the early morning of the effective or distribution date, C-BEST will distribute the proceeds automatically to the participant accounts.</p> <p>As an internationally standardized institution, KSEI is committed to adopt the Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) issued by the Committee on Payment and Market Infrastructure and the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) which are global standard-setters for securities and futures market as well as for payment, clearing, and settlement. The PFMI consists of 24 principles and this disclosure document explains how our settlement and depository activities are governed and operated, and how risks are managed.</p>	<p>konfirmasi hasil aksi korporasi pada hari yang sama.</p> <p>Pada saat <i>record date</i>, C-BEST akan menghitung jumlah pendapatan kotor, jumlah pajak (jika ada), dan jumlah bersih (jika ada) serta membuat laporan untuk penerbit, agen transfer, pialang dan bank kustodian. Pada dini hari tanggal efektif atau tanggal pendistribusian, C-BEST akan mendistribusikan hasil tindakan korporasi secara otomatis ke rekening partisipan.</p> <p>Sebagai lembaga dengan standar internasional, KSEI berkomitmen untuk mengadopsi Prinsip Infrastruktur Pasar Keuangan atau <i>the Principles for Financial Market Infrastructures</i> (PFMI) yang dikeluarkan oleh <i>Committe on Payment and Market Infrastructure</i> dan <i>the International Organisation of Securities Commissions</i> (IOSCO) yang menerbitkan standar global untuk pasar efek dan komoditas berjangka terkait dengan pembayaran, kliring, dan penyelesaian. PFMI terdiri dari 24 prinsip dan dokumen pengungkapan ini menjelaskan bagaimana aktivitas penyelesaian dan penyimpanan kami diatur dan dioperasikan, dan bagaimana risiko dikelola.</p>
---	---

Principle 1: Legal

An FMI should have a well-founded, clear, transparent, and enforceable legal basis for each material aspect of its activities in all relevant jurisdictions.

Sebuah FMI harus memiliki dasar hukum yang kuat, jelas, transparan, dan dapat ditegakkan untuk setiap aspek material dari kegiatannya di semua yurisdiksi yang relevan.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
<p>KSEI’s legal bases are embedded in the national laws, regulations (including but not limited to government and OJK regulations) and KSEI’s rules. The main elements embedded in the national law are KSEI’s license, purpose of establishment, ownership, rights to issue rules, rights to operate as a private corporation, as well as the rights of shareholders.</p> <p>There is a high degree of clarity concerning KSEI’s rules, procedures and contracts. The CSD has well established procedures to amend rules (rule-making-rule - RMR). The RMR ensure that all interested parties fully understand the nature of the changes to rules and the implications those amendments will have. Open processes to enable participants and shareholders to propose changes to KSEI rules are in place. The regulator, the exchange and the market’s central counterparty have recommended that KSEI amends its rules in the past. Furthermore, KSEI has formed a regulation committee to advise and assist KSEI in assessing its regulations. On annual basis,</p>	<p>Dasar hukum KSEI melekat pada hukum nasional dan peraturan. Dalam beberapa kasus, aspek-aspek ini hanya didokumentasikan dalam aturan KSEI sendiri. Unsur utama yang terkandung dalam hukum nasional adalah hak KSEI untuk beroperasi sebagai perusahaan swasta, serta hak pemegang saham.</p> <p>Ada kejelasan yang tinggi tentang aturan, prosedur, dan kontrak KSEI. KSEI memiliki prosedur yang jelas untuk mengubah aturan (melalui <i>rule-making-rule</i> atau RMR). RMR memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan sepenuhnya memahami sifat dari perubahan aturan dan implikasi dari amandemen tersebut. KSEI memiliki proses terbuka yang memungkinkan peserta dan pemegang saham mengusulkan perubahan aturan KSEI. Sampai dengan saat ini, terdapat kondisi dimana Regulator, Bursa, dan KPEI meminta agar KSEI mengubah aturannya. Selain itu, KSEI telah membuat Komite Peraturan untuk memberi masukan dan</p>

<p>KSEI is also conducting independent legal review on its operational activities to ensure that all activities have clear legal basis.</p> <p>The mechanism to effectively articulate its legal grounds to any interested party is also in place. These include physical mail, KSEI's newsletter and socialisation programmes. Key information including all regulations and circular letters are displayed in both Bahasa Indonesia and English in KSEI's website.</p>	<p>pendampingan kepada KSEI dalam mengkaji peraturan. Secara berkala setiap tahun, KSEI juga melakukan kajian hukum independen atas kegiatan operasionalnya untuk memastikan bahwa semua kegiatan memiliki landasan hukum yang jelas.</p> <p>KSEI memiliki mekanisme untuk secara efektif mengartikulasikan dasar hukumnya kepada pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan melalui surat fisik, buletin KSEI dan program sosialisasi. Informasi penting termasuk seluruh peraturan dan surat pengumuman ditampilkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di situs web KSEI.</p>
--	---

Principle 2: Governance

An FMI should have governance arrangements that are clear and transparent, promote the safety and efficiency of the FMI, and support the stability of the broader financial system, other relevant public interest considerations, and the objectives of relevant stakeholders.

Sebuah FMI harus memiliki pengaturan tata kelola yang jelas dan transparan, menunjukkan keamanan dan efisiensi FMI, dan mendukung stabilitas sistem keuangan yang lebih luas, pertimbangan kepentingan publik terkait lainnya, dan tujuan pemangku kepentingan terkait.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
<p>KSEI's governance arrangements are defined in a wide range of documentation. The organisation's objectives include key aspects such as service efficiency, system efficiency and effectiveness. The law also indicates that KSEI must provide settlement services in an orderly, fair and efficient manner. KSEI is constantly measuring its performance through a series of key performance indicators that have been approved and monitored by the FSA (OJK) and through the feedback from participants.</p>	<p>Pengaturan tata kelola KSEI didefinisikan dalam berbagai dokumen. Tujuan organisasi mencakup aspek-aspek pokok seperti efisiensi layanan, efisiensi sistem, dan efektivitas sistem. Undang-undang tersebut juga menunjukkan bahwa KSEI harus memberikan layanan penyelesaian secara teratur, wajar, dan efisien. KSEI senantiasa mengukur kinerjanya melalui serangkaian <i>key performance indicator</i> yang telah disetujui dan dipantau oleh OJK.</p>
<p>The governance arrangements are clearly defined and documented in the regulations. These arrangements are made public through KSEI's website and in the company gazette. The responsibilities of the board of commissioners and the board of directors are properly documented in the rules and regulation issued by the FSA and Company's Articles of Association approved by the FSA. Such responsibilities include mergers and acquisitions, investment strategy, acquisition and disposal of assets, capital projects, borrowing, monitoring KSEI's management team and overseeing risk and controls systems.</p>	<p>Pengaturan tata kelola didefinisikan dengan jelas dan didokumentasikan dalam peraturan. Pengaturan ini diumumkan melalui situs web KSEI dan berita resmi. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi didokumentasikan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh OJK dan Anggaran Dasar Perusahaan yang disetujui oleh OJK. Tanggung jawab tersebut meliputi <i>merger</i> dan akuisisi, strategi investasi, akuisisi dan pelepasan aset, proyek berbasis modal, peminjaman, pemantauan tim manajemen KSEI, pengawasan sistem risiko dan kontrol.</p>

The charters of the board of commissioners and the board of directors are disclosed to the general public through the annual report, which governs the activities of all commissioners and directors in KSEI. These documents also contain the steps for management of conflict of interest in the board of commissioners and the board of directors.

At KSEI, the position of chief executive officer (CEO) and the chairman of the board are not held by the same individual. The board of commissioners consists of three people, who have a wide range of experiences and expertises in areas such as economics, finance, law, IT and, communications and risk management. The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee which has a strategic role to carry out the overall supervisory function, through working relationships with Internal Audit under the Board of Directors, and Public Accountants who are in charge of auditing the Company's financial statements. The audit committee consists of individuals who have a wide range of capabilities in financial audit and other relevant expertise.

KSEI is run by three directors, who share all the key functions and responsibilities. The directors also form committees that include shareholders and participants. These committees are: business, regulatory, internal control, and budget and audit. The responsibilities of these committees are stated and described in the charter of each committee.

KSEI has a well-documented risk management framework. The board of directors President Director set the risk tolerance and risk

Tata kelola bagi dewan komisaris dan direksi diungkapkan kepada masyarakat umum melalui laporan tahunan. Terdapat piagam dewan komisaris dan dewan direksi yang mengatur kegiatan seluruh komisaris dan direksi di KSEI. Dokumen-dokumen tersebut juga memuat langkah-langkah pengelolaan benturan kepentingan pada dewan komisaris dan direksi.

Di KSEI, posisi *chief executive officer* (CEO) dan *chairman* tidak dijabat oleh satu orang yang sama. Dewan komisaris terdiri dari tiga orang, yang memiliki berbagai pengalaman dan keahlian di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, hukum, TI dan, komunikasi dan manajemen risiko. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang memiliki peran strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan secara keseluruhan, melalui hubungan kerja dengan Audit Internal di bawah Direksi, dan Akuntan Publik yang bertugas mengaudit laporan keuangan Perusahaan. Komite audit terdiri dari individu-individu yang memiliki berbagai kemampuan dalam audit keuangan dan keahlian terkait lainnya.

KSEI dijalankan oleh tiga direktur, yang membagi semua fungsi dan tanggung jawab utama. Direksi juga membentuk komite yang mencakup pemegang saham dan peserta. Komite-komite tersebut terdiri dari komite kerja, komite peraturan, pengendalian interen, dan anggaran. Tugas dan tanggung jawab dari Komite-komite tersebut dijelaskan pada piagam dari masing-masing Komite.

KSEI memiliki kerangka manajemen risiko yang terdokumentasi dengan baik. Dewan direksi menetapkan toleransi risiko dan

<p>appetite of the organisation and thus, is ultimate responsibility in terms of risk management. The risk officers consisting of the unit heads and risk owners consisting of division heads are responsible for overseeing and monitoring all procedures of KSEI. These risk officers and risk owners report to the Risk Management Unit regarding the finding of their analysis which will also be reported to the board of directors. On top of it, KSEI regularly hold BCP testing to ensure safety and efficiency of its operational activities.</p>	<p>preferensi tingkat risiko organisasi dan dengan demikian, merupakan tanggung jawab utama terkait manajemen risiko. <i>Risk officer</i> yang terdiri dari kepala unit dan <i>risk owner</i> yang terdiri dari kepala divisi bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau seluruh prosedur KSEI. <i>Risk officer</i> dan <i>risk owner</i> ini melaporkan kepada Unit Manajemen Risiko mengenai temuan analisisnya yang juga akan dilaporkan kepada direksi. Selain itu, KSEI secara rutin melakukan <i>BCP testing</i> untuk memastikan keamanan dan efisiensi dari aktivitas operasionalnya.</p>
--	---

Principle 3: Framework for the comprehensive management of risks

An FMI should have a sound risk-management framework for comprehensively managing legal, credit, liquidity, operational, and other risks.

Sebuah FMI harus memiliki kerangka manajemen risiko yang kuat untuk mengelola risiko hukum, kredit, likuiditas, operasional, dan lainnya secara komprehensif.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
<p>The risks that arise in, or are borne by KSEI include: market, liquidity, counterparty/credit, reputational, operational, legal (compliance), general business (strategic risk), asset commitment and asset servicing risk. The CSD has established clear lines of responsibility to identify and assess risks. To this end, the organisation relies in its risk management unit, audit (internal/external), as well as processes and procedures analysis. A bottom-up analysis is done to build a risk map, at least once a year. KSEI has reviewed its recovery and resolution plan and made the necessary changes to be aligned with the PFMI guidelines .The scope of identification and documentation covers most of KSEI’s areas, process and procedures. In addition to the risk map, KSEI relies on risk register and a specialised software package, for risk management purposes. Risk exposures are reviewed twice a year. Furthermore, the risk indicators are also reviewed twice a year to ensure that the KPI is achieved. Last but not least, KSEI’s internal control committee holds monthly meeting and monitor the audit results.</p>	<p>Risiko yang timbul atau ditanggung KSEI antara lain: pasar, likuiditas, <i>counterparty</i>/kredit, reputasi, operasional, hukum (kepatuhan), bisnis umum (risiko strategis), komitmen aset dan risiko servis aset. KSEI telah menetapkan garis tanggung jawab yang jelas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko. Untuk tujuan ini, organisasi mengandalkan unit manajemen risiko, audit (internal/eksternal), serta proses dan analisis prosedur. Analisis <i>bottom-up</i> dilakukan untuk membangun peta risiko, setidaknya setahun sekali. KSEI telah meninjau <i>recovery</i> dan <i>resolution plan</i> serta membuat perubahan sesuai dengan panduan PFMI. Ruang lingkup identifikasi dan dokumentasi mencakup sebagian besar area, proses, dan prosedur KSEI. Selain peta risiko, KSEI mengandalkan <i>risk register</i> dan <i>software</i> khusus untuk manajemen risiko. <i>Risk exposure</i> ditinjau dua kali setahun. Selain itu, indikator risiko juga ditinjau dua kali setahun untuk memastikan tercapainya KPI. Selain itu, komite Pengendalian Interen KSEI melaksanakan rapat bulanan dan meninjau hasil audit.</p>
<p>KSEI uses its annual report to advise participants of risk-related information. The entity monitors the most relevant risks it poses to participants (asset safety, asset</p>	<p>KSEI menggunakan laporan tahunannya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait risiko kepada partisipan. KSEI memantau risiko paling relevan yang</p>

<p>commitment, and asset servicing) on a regular basis. Furthermore, KSEI has identified a wide and complete risk of scenarios that could prevent it from providing its core functions.</p>	<p>berpotensi berdampak kepada partisipan (keamanan aset, komitmen aset, dan pelayanan aset) secara teratur. Lebih lanjut, KSEI telah mengidentifikasi skenario risiko yang menyeluruh dan lengkap yang berpotensi mencegah KSEI untuk menjalankan fungsi intinya.</p>
---	--

Principle 4: Credit Risk

An FMI should effectively measure, monitor, and manage its credit exposure to participants and those arising from its payment, clearing, and settlement processes. An FMI should maintain sufficient financial resources to cover its credit exposure to each participant fully with a high degree of confidence. In addition, a CCP that is involved in activities with a more-complex risk profile or that is systemically important in multiple jurisdictions should maintain additional financial resources sufficient to cover a wide range of potential stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the two largest participants and their affiliates that would potentially cause the largest aggregate credit exposures to the CCP in extreme but plausible market conditions. All other CCPs should maintain, at a minimum, total financial resources sufficient to cover the default of the one participant and its affiliates that would potentially cause the largest aggregate credit exposures to the CCP in extreme but plausible market conditions.

FMI harus secara efektif mengukur, memantau, dan mengelola eksposur kreditnya kepada peserta dan risiko yang timbul dari proses pembayaran, kliring, dan penyelesaiannya. FMI harus mempertahankan sumber daya keuangan yang cukup untuk menutupi eksposur kreditnya kepada setiap peserta sepenuhnya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Selain itu, CCP yang terlibat dalam aktivitas dengan profil risiko yang lebih kompleks atau yang secara sistemik penting di beberapa yurisdiksi harus mempertahankan sumber daya keuangan tambahan yang cukup untuk mencakup berbagai skenario potensi stres yang harus mencakup, namun tidak terbatas pada, default dari dua peserta terbesar dan afiliasinya yang berpotensi menyebabkan eksposur kredit agregat terbesar ke PKC dalam kondisi pasar yang ekstrim tetapi masuk akal. Semua CCP lainnya harus mempertahankan, minimal, total sumber daya keuangan yang cukup untuk menutupi default dari satu peserta dan afiliasinya yang berpotensi menyebabkan eksposur kredit agregat terbesar ke CCP dalam kondisi pasar yang ekstrim tetapi mungkin.

Principle 4 is not applicable to KSEI.

Prinsip 4 tidak berlaku di KSEI.

Principle 5: Collateral

An FMI that requires collateral to manage its or its participants' credit exposure should accept collateral with low credit, liquidity, and market risks. An FMI should also set and enforce appropriately conservative haircuts and concentration limits.

FMI yang memerlukan agunan untuk mengelola eksposur kredit pesertanya harus menerima agunan dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang rendah. FMI juga harus menetapkan dan menerapkan nilai konservatif dan batas konsentrasi yang tepat.

Principle 5 is not applicable to KSEI.

Prinsip 5 tidak berlaku di KSEI.

Principle 6: Margin

A CCP should cover its credit exposures to its participants for all products through an effective margin system that is risk-based and regularly reviewed.

CCP harus menutupi eksposur kreditnya kepada pesertanya untuk semua produk melalui sistem margin efektif yang berbasis risiko dan ditinjau secara berkala.

Principle 6 is not applicable to KSEI.

Prinsip 6 tidak berlaku di KSEI.

Principle 7: Liquidity Risk

An FMI should effectively measure, monitor, and manage its liquidity risk. An FMI should maintain sufficient liquid resources in all relevant currencies to effect same-day and, where appropriate, intraday and multiday settlement of payment obligations with a high degree of confidence under a wide range of potential stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the participant and its affiliates that would generate the largest aggregate liquidity obligation for the FMI in extreme but plausible market conditions.

Sebuah FMI harus secara efektif mengukur, memantau, dan mengelola risiko likuiditasnya. Sebuah FMI harus mempertahankan sumber daya likuid yang cukup dalam semua mata uang yang relevan untuk *same-day*, dan jika diperlukan, penyelesaian kewajiban pembayaran *intraday* dan *multiday* dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam berbagai skenario dan potensi tekanan yang harus mencakup, tetapi tidak terbatas untuk, kegagalan dari pemakai jasa dan afiliasinya yang akan menyebabkan kewajiban likuiditas agregat terbesar untuk FMI dalam kondisi pasar yang ekstrim tetapi mungkin terjadi.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
<p>KSEI operates nostro accounts that reflect the balances in the account of the payment banks. KSEI monitors the realignment of the cash account in the banks. This process takes place six times a day. In terms of intraday liquidity, KSEI has an agreement with the banks whereby the latter provide cash liquidity for the participants intraday. KSEI can see the balances of the participants' cash and securities accounts in C-BEST.</p> <p>The Indonesia Central Securities Depository (KSEI) with the support of the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia has successfully implemented the Full CeBM Mechanism for Securities Companies on July 22, 2019. Full CeBM implementation aims to reduce counterparty risk in fund settlement transactions in the Indonesia capital market and in line with</p>	<p>Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah berhasil mengimplementasikan Mekanisme <i>Full CeBM</i> untuk perusahaan efek pada 22 Juli 2019. Implementasi <i>Full CeBM</i> bertujuan untuk mengurangi risiko <i>counterparty</i> dalam penyelesaian dana transaksi di pasar modal Indonesia dan sejalan dengan rekomendasi IOSCO terkait dengan <i>Principles for Financial Market Infrastructure</i> (FMI). Mekanisme <i>CeBM</i> memungkinkan Surat Berharga untuk menyelesaikan pembayaran Ekuitas dan Obligasi Korporasi dalam mata uang Rupiah melalui rekening KSEI di Bank Indonesia (BI) melalui Sistem <i>BI-Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS). Transaksi non-IDR akan diselesaikan melalui satu bank umum yang ditunjuk sebagai bank pembayaran.</p>

IOSCO recommendations related to the Principles for Financial Market Infrastructure (FMI).

The CeBM mechanism allows securities companies and custodian banks to settle payments for denominated Equities and Corporate Bonds in IDR through KSEI accounts at Bank Indonesia (BI) via the BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) System. Non-IDR transactions will be settled via one particular appointed commercial bank as the payment bank.

KSEI does not guarantee settlement. KPEI, the market's central counterparty (CCP) is responsible for guarantying on-exchange transactions. In terms of off-exchange settlement, KSEI conducts a gross-gross settlement process, which takes place on real-time.

KSEI has access to the Bank Indonesia RTGS and BI-SSSS in relation to government bond settlement. KSEI became a participant of the BI-RTGS in August 2006. However, KSEI and BI are currently exploring the possibility of implementing cash settlement using central bank money. This would be achieved through a hybrid model as the first step, where all settlement of the custodian banks and the settlement for government bond for all participants (securities companies and custodian banks) would be conducted by central bank money.

KSEI tidak menjamin penyelesaian. KPEI, selaku *central counterparty* (CCP) pasar bertanggung jawab untuk menjamin transaksi di bursa. Dalam hal setelmen di luar bursa, KSEI melakukan proses setelmen *gross-gross* yang berlangsung secara *real-time*.

KSEI memiliki akses ke Bank Indonesia RTGS dan BI-SSSS terkait setelmen obligasi pemerintah. KSEI menjadi peserta BI-RTGS pada Agustus 2006.

Principle 8: Settlement Finality

An FMI should provide clear and certain final settlement, at a minimum by the end of the value date. Where necessary or preferable, an FMI should provide final settlement intraday or in real time.

Sebuah FMI harus melaksanakan setelmen yang jelas dan pasti, selambatnya pada akhir hari dari berlangsungnya transaksi. Bila perlu, FMI harus memberikan penyelesaian akhir *intraday* atau secara real time.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
<p>In Indonesia, finality is understood to take place at the moment of settlement</p> <ul style="list-style-type: none">- in the RTGS for Cash Settlement;- in CSD for securities safekept in CSD other than Government Bonds;- in Bank Indonesia for Government Bonds.	<p>Di Indonesia, keberhasilan terjadi pada saat penyelesaian</p> <ul style="list-style-type: none">- di RTGS untuk penyelesaian tunai;- di LPP untuk penyimpanan efek selain obligasi pemerintah;- di Bank Indonesia KSEI untuk obligasi pemerintah
<p>Settlement is irrevocable; for on-exchange trade, market practice that trades become irrevocable after a few minutes following the agreement of the transaction. OTC transactions can be revoked at any point during the settlement cycle as long as the instruction status is not final yet.</p>	<p>Penyelesaian tidak dapat dibatalkan; untuk perdagangan di bursa, praktik pasar yaitu perdagangan menjadi tidak dapat dibatalkan setelah beberapa menit setelah kesepakatan transaksi. Transaksi OTC dapat dibatalkan kapan saja selama siklus penyelesaian selama status instruksi belum final.</p>

Principle 9: Money Settlement

An FMI should conduct its money settlements in central bank money where practical and available. If central bank money is not used, an FMI should minimise and strictly control the credit and liquidity risk arising from the use of commercial bank money.

Sebuah FMI harus melakukan penyelesaian uangnya dalam uang bank sentral jika mungkin dan tersedia. Jika uang bank sentral tidak digunakan, FMI harus meminimalkan dan secara ketat mengontrol risiko kredit dan likuiditas yang timbul dari penggunaan uang bank komersial.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
<p>For all securities, KSEI settles those transactions in IDR denomination in central bank money. For USD settlement transactions, KSEI has appointed one particular commercial bank as the payment bank. In order to select the bank, KSEI used a methodology that assesses the liquidity and credit risks of the payment bank. This process also includes a due diligence visit.</p>	<p>Untuk semua efek, KSEI menyelesaikan transaksi tersebut dalam mata uang Rupiah dengan uang bank sentral. Untuk transaksi setelmen USD, KSEI telah menunjuk satu bank umum tertentu sebagai bank pembayaran. Untuk memilih bank tersebut, KSEI menggunakan metodologi yang menilai likuiditas dan risiko kredit bank pembayaran. Proses ini juga mencakup penilaian <i>due diligence</i>.</p>
<p>The legal arrangements with the payment banks are solid in terms of definition of finality. The law, as well as the contract between the CSD and the bank, stipulates when cash finality takes place.</p>	<p>Pengaturan hukum dengan bank pembayaran solid dalam hal definisi finalitas. Undang-undang, serta kontrak antara CSD dan bank, menetapkan kapan finalitas tunai terjadi.</p>

Principle 10: Physical Securities

An FMI should clearly state its obligations with respect to the delivery of physical instruments or commodities and should identify, monitor, and manage the risks associated with such physical deliveries.

FMI harus dengan jelas menyatakan kewajibannya sehubungan dengan pengiriman instrumen fisik atau komoditas dan harus mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko yang terkait dengan pengiriman fisik tersebut.

Principle 10 is not applicable to KSEI.

Prinsip 10 tidak berlaku di KSEI.

Principle 11: Central Securities Depositories

A CSD should have appropriate rules and procedures to help ensure the integrity of securities issues and minimise and manage the risks associated with the safekeeping and transfer of securities. A CSD should maintain securities in an immobilised or dematerialised form for their transfer by book entry.

Sebuah CSD harus memiliki aturan dan prosedur yang tepat untuk membantu memastikan integritas masalah sekuritas dan meminimalkan serta mengelola risiko yang terkait dengan penyimpanan dan transfer sekuritas. Sebuah CSD harus menyimpan surat berharga dalam bentuk tidak bergerak atau tidak berwujud untuk transfernya melalui pemindahbukuan.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
<p>KSEI acts as Indonesia’s central securities depository responsible for safekeeping 100% of book-entry securities in Indonesia (although there are some physical securities with the registrar) except Government Bonds since KSEI acts as Sub-Registry of Bank Indonesia. The CSD has established rules and procedures related to the rights of securities issuers and holders. KSEI conducts reconciliations on a daily basis and established procedures to manage reconciliation breaks. There are strict controls related to the creation and deletion of securities. Securities can only be moved from an account if there is an instruction from a participant. KSEI reports their historical movements to participants through a proprietary system called Online Research and Centralized Historical Data (ORCHID).</p>	<p>KSEI bertindak sebagai lembaga penyelesaian dan penyimpanan efek di Indonesia dan bertanggung jawab untuk memberikan kepastian 100% atas pemindahbukuan efek di Indonesia (walaupun ada beberapa efek warkat yang disimpan oleh Biro Administrasi Efek). KSEI telah menetapkan aturan dan prosedur terkait hak-hak penerbit dan pemegang efek. KSEI melakukan rekonsiliasi setiap hari dan menetapkan prosedur untuk mengelola jeda rekonsiliasi. Terdapat kontrol ketat terkait dengan pencatatan dan penarikan surat berharga. Efek hanya dapat dipindahkan dari rekening jika ada instruksi dari peserta. KSEI melaporkan pergerakan historis atas efek kepada pemakai jasa melalui sistem yang disebut <i>Online Research and Centralized Historical Data</i> (ORCHID).</p>
<p>KSEI checks availability of balances before the settlement process. This enables it to prevent settlement if there are insufficient securities in the related account. KSEI safekeeping procedures and processes are audited by both</p>	<p>KSEI melakukan pengecekan ketersediaan saldo sebelum proses penyelesaian transaksi. Hal ini ditujukan untuk mencegah penyelesaian Transaksi jika saldo efek tidak mencukupi di akun terkait. Prosedur dan</p>

<p>an internal and an external team.</p> <p>KSEI's rules and procedures include provisions to protect assets against custody risk in case of negligence, misuse of assets, fraud, poor administration and inadequate recordkeeping.</p> <p>KSEI own assets are segregated from those of the participants. Furthermore, there is segregation of participant assets.</p>	<p>proses penyimpanan KSEI diaudit oleh tim internal dan eksternal.</p> <p>Aturan dan prosedur yang dimiliki KSEI mencakup ketentuan untuk melindungi aset dari risiko kustodian jika terjadi kelalaian, penyalahgunaan aset, penipuan, administrasi yang buruk, dan pencatatan yang tidak memadai.</p> <p>Aset milik KSEI dipisahkan dari aset milik partisipan. Selanjutnya, terdapat juga pemisahan aset antar partisipan.</p>
--	---

Principle 12: Exchange-of-value Settlement System

If an FMI settles transactions that involve the settlement of two linked obligations (for example, securities or foreign exchange transactions), it should eliminate principal risk by conditioning the final settlement of one obligation upon the final settlement of the other.

Jika LJK menyelesaikan transaksi yang melibatkan penyelesaian dua kewajiban terkait (misalnya, transaksi efek atau valuta asing), LJK harus menghilangkan risiko prinsipal dengan mengkondisikan penyelesaian akhir dari satu kewajiban pada penyelesaian akhir yang lain.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
KSEI uses an integrated BIS model 1 for settlement (gross-gross). On-exchange trades are netted by KPEI (securities and cash) and a batch file is passed on to the CSD for settlement. OTC transactions settle continuously and simultaneously on a gross basis. KSEI settles on a DVP or FOP basis the following assets: equities, Fixed Income, and other assets deposited in KSEI.	KSEI menggunakan model BIS terintegrasi 1 untuk penyelesaian (<i>gross-gross</i>). KPEI melakukan kliring atas transaksi bursa (surat berharga dan uang tunai) kemudian diteruskan kepada LPP untuk proses penyelesaian. Transaksi OTC diselesaikan secara berkelanjutan dan simultan secara <i>gross</i> . KSEI melakukan penyelesaian secara DVP atau FOP aset berikut: ekuitas, Pendapatan Tetap, dan aset lainnya yang disimpan di KSEI.

Principle 13: Participant-default Rules and Procedures

An FMI should have effective and clearly defined rules and procedures to manage a participant default. These rules and procedures should be designed to ensure that the FMI can take timely action to contain losses and liquidity pressures and continue to meet its obligations.

LJK harus memiliki aturan dan prosedur yang efektif dan jelas untuk mengelola kegagalan pemakai jasa. Aturan dan prosedur ini harus dirancang untuk memastikan bahwa LJK dapat mengambil tindakan pada waktu yang tepat untuk menahan kerugian dan tekanan likuiditas dan dapat terus memenuhi kewajibannya.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
Rules and definition on default are documented in the Law and in KSEI regulation. These indicate that KSEI must block the account of a defaulting party. KSEI responsibility in this area is limited to the OTC segment, given that KPEI acts as the CCP for on-exchange transactions. In case of a default, KSEI can only block the account of the defaulting party if there is an instruction from the authorities.	Ketentuan dan definisi kegagalan diatur dalam Undang-undang dan peraturan KSEI. Dalam hal kegagalan, KSEI hanya dapat memblokir rekening pihak yang gagal jika ada instruksi dari otoritas.

Principle 14: Segregation and Portability

A CCP should have rules and procedures that enable the segregation and portability of positions of a participant's customers and the collateral provided to the CCP with respect to those positions.

CCP harus memiliki aturan dan prosedur yang memungkinkan pemisahan dan portabilitas posisi anggota pemakai jasa dan jaminan yang diberikan kepada CCP sehubungan dengan posisi tersebut.

Principle 14 is not applicable to KSEI.

Prinsip 14 tidak berlaku di KSEI.

Principle 15: General Business Risks

An FMI should identify, monitor, and manage its general business risk and hold sufficient liquid net assets funded by equity to cover potential general business losses so that it can continue operations and services as a going concern if those losses materialise. Further, liquid net assets should at all times be sufficient to ensure a recovery or orderly wind-down of critical operations and services.

LJK harus mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko bisnis secara umum dan memiliki aset bersih likuid yang cukup yang didanai oleh ekuitas untuk menutupi potensi kerugian bisnis umum sehingga dapat melanjutkan operasi dan layanan secara berkelanjutan jika kerugian tersebut terjadi. Selanjutnya, aset bersih yang likuid harus selalu cukup untuk memastikan pemulihan atau orderly wind-down dari operasi dan layanan penting.

<p>Principle Summary:</p> <p>As part of its risk framework, KSEI has identified potential losses related to general business risks. To this end, KSEI uses a qualitative operational analysis and in-house legal analysis. The analysis covers a wide spectrum of risk that include, among others, operational, fraud, force majeure, business decisions, system breakdown, outsourcing risk, as well as legal and regulatory risk.</p> <p>KSEI's liquid net assets largely cover more than six months of current operating expenses. KSEI mostly invests its resources in Indonesian time deposits and invest the rest in government bonds, corporate bonds with a specific rating, and mutual funds.</p>	<p>Ringkasan Prinsip:</p> <p>Sebagai bagian dari kerangka risiko, KSEI telah mengidentifikasi potensi kerugian terkait dengan risiko bisnis secara umum. Untuk itu, KSEI menggunakan analisis operasional kualitatif dan analisis hukum internal. Analisis tersebut mencakup spektrum risiko yang luas yang mencakup antara lain risiko operasional, penipuan, <i>force majeure</i>, keputusan bisnis, kerusakan sistem, risiko <i>outsourcing</i>, serta risiko hukum dan peraturan.</p> <p>Aset bersih likuid KSEI dapat memenuhi lebih dari enam bulan biaya operasional. KSEI sebagian besar menginvestasikan sumber dayanya pada deposito berjangka di Indonesia serta lainnya diinvestasikan pada obligasi pemerintah, obligasi korporasi dengan peringkat tertentu, dan reksa dana.</p>
--	--

Principle 16: Custody and Investment Risks

An FMI should safeguard its own and its participants' assets and minimise the risk of loss on and delay in access to these assets. An FMI's investments should be in instruments with minimal credit, market, and liquidity risks.

LJK harus melindungi asetnya sendiri dan pemakai jasa dan meminimalkan risiko kerugian dan keterlambatan akses ke aset tersebut. Investasi LJK harus dalam instrumen dengan risiko kredit, pasar, dan likuiditas yang minimal.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
<p>KSEI's portfolio is held under appointed custodian banks and its cash and cash equivalent are held in several appointed commercial banks.</p> <p>KSEI's interest or ownership rights concerning assets held in custody are documented in the national law and the regulation. The legal framework protects KSEI's assets in case of default of its custodian bank. The selection of such banks is done following KSEI's strict methodology.</p> <p>KSEI has a documented investment strategy. This plan consists of a set of guidelines to establish asset class exposure, asset class limits based on liquidity risk indicators. This plan is periodically reviewed and revised if necessary by the investment committee and the board of directors.</p>	<p>Portofolio KSEI berada pada bank kustodian yang ditunjuk dan kas dan setara kasnya berada di beberapa bank umum yang ditunjuk.</p> <p>Kepentingan atau hak kepemilikan KSEI atas aset dalam penitipan diatur dalam undang-undang dan peraturan. Kerangka hukum melindungi aset KSEI jika terdapat wanprestasi pada bank kustodian. Pemilihan bank tersebut dilakukan dengan metodologi yang ketat dari KSEI.</p> <p>KSEI memiliki strategi investasi yang terdokumentasi. Rencana ini terdiri dari seperangkat pedoman untuk menetapkan eksposur kelas aset, batas kelas aset berdasarkan indikator risiko likuiditas. Rencana ini ditinjau dan direvisi secara berkala jika perlu oleh komite investasi dan dewan direksi.</p>

Principle 17: Operational Risk

An FMI should identify the plausible sources of operational risk, both internal and external, and mitigate their impact through the use of appropriate systems, policies, procedures, and controls. Systems should be designed to ensure a high degree of security and operational reliability and should have adequate, scalable capacity. Business continuity management should aim for timely recovery of operations and fulfilment of the FMI's obligations, including in the event of a wide-scale or major disruption.

LJK harus mengidentifikasi sumber risiko operasional yang rasional, baik internal maupun eksternal, dan mengurangi dampaknya melalui penggunaan sistem, kebijakan, prosedur, dan kontrol yang sesuai. Sistem harus dirancang untuk memastikan tingkat keamanan dan keandalan operasional yang tinggi dan harus memiliki kapasitas skalabilitas yang memadai. Manajemen kelangsungan bisnis harus bertujuan untuk pemulihan operasi yang tepat waktu dan pemenuhan kewajiban LJK, termasuk jika terjadi gangguan skala luas atau besar.

<p>Principle Summary:</p> <p>KSEI has an operational risk framework, which is integrated to the overall risk framework of the organisation. The areas that the risk policy covers include: IT systems, human resources, settlement, custody and safekeeping, corporate actions, account management, communications, legal, business development, strategic management and finance, risk management and internal audit.</p> <p>KSEI has clear lines of responsibility concerning the identification and assessment of operational risks. Operational risk controls are signed off by the risk officer, risk owner (head of respective unit and head of respective division). KSEI has well-documented operational risk management framework, as well as guidelines and manuals, which are reviewed at least once a year.</p> <p>There is a strong audit programme that consists of internal operational audit, external</p>	<p>Ringkasan Prinsip:</p> <p>KSEI memiliki kerangka kerja risiko operasional yang terintegrasi dengan kerangka risiko organisasi secara keseluruhan. Area yang dicakup oleh kebijakan risiko meliputi: sistem TI, sumber daya manusia, penyelesaian dan penyimpanan, tindakan korporasi, pengelolaan rekening, komunikasi, hukum, pengembangan bisnis, manajemen strategis dan keuangan, manajemen risiko dan audit internal.</p> <p>KSEI memiliki tanggung jawab yang jelas mengenai identifikasi dan penilaian risiko operasional. Pengendalian risiko operasional ditandatangani oleh <i>risk officer</i>, <i>risk owner</i> (kepala unit dan kepala divisi masing-masing). KSEI memiliki kerangka kerja manajemen risiko operasional yang terdokumentasi dengan baik, serta pedoman dan manual, yang ditinjau setidaknya setahun sekali.</p> <p>Terdapat program audit yang kuat yang terdiri dari audit internal dan eksternal dari sisi</p>
--	---

<p>operational audit and IT audits. The scope of the audits is wide and covers all areas of KSEI's operations. The operational audit consists of ISO 9001 and ISO 27001 processes. Auditors have direct access to the audit committee.</p>	<p>operasional dan audit TI. Ruang lingkup audit sangat luas dan mencakup seluruh wilayah operasi KSEI. Audit operasional terdiri dari proses ISO 9001 dan ISO 27001. Auditor memiliki akses langsung ke komite audit.</p>
<p>KSEI has an operational reliability plan, and clear down-time tolerance limits according to FSA regulations. In addition, there are well defined targets in terms of recovery point objective and recovery time objective. These targets are reviewed every year.</p>	<p>KSEI memiliki rencana keandalan operasional, dan batas toleransi waktu yang jelas sesuai peraturan OJK. Selain itu, ada target yang ditetapkan dengan baik dalam hal tujuan titik pemulihan (RPO) dan tujuan waktu pemulihan (RTO). Target ini ditinjau setiap tahun.</p>
<p>In terms of security, KSEI has a wide range of measures in place to protect KSEI, its staff and equipment. The security plans include procedures to prevent, mitigate, contain and/or manage fire, flooding, earthquake, terrorism attack, fraud and theft, social uprising, and war or violent conflict. These plans are reviewed annually. KSEI also has a disaster recovery (DR) and business continuity (BC) plan available and tested. The DR site is around 30km away from the main site, which is consistent with best global practices. KSEI's BS site is dedicated and has capacity for all departments in the organisation.</p>	<p>Dari segi keamanan, KSEI memiliki berbagai langkah untuk melindungi perusahaan, staf dan peralatannya. Rencana keamanan mencakup prosedur untuk mencegah, mengurangi, menahan dan/atau mengelola kebakaran, banjir, gempa bumi, serangan terorisme, penipuan dan pencurian, pemberontakan sosial, dan perang atau konflik kekerasan. Rencana ini ditinjau setiap tahun. KSEI juga memiliki rencana pemulihan bencana (DR) dan kelangsungan bisnis (BC) yang tersedia dan diuji. Lokasi DR berjarak sekitar 30 km dari lokasi utama, yang konsisten dengan praktik terbaik secara global. Lokasi BS KSEI didedikasikan dan memiliki kapasitas untuk semua divisi dalam organisasi.</p>

Principle 18: Access and participation requirements

An FMI should have objective, risk-based, and publicly disclosed criteria for participation, which permit fair and open access.

LJK harus memiliki kriteria partisipasi yang objektif, berbasis risiko, dan diungkapkan kepada publik, yang memungkinkan akses yang adil dan terbuka.

Principle Summary	Ringkasan Prinsip
<p>All brokers or custodian banks who obtained licenses under OJK regulations can become a member of KSEI. There are also other entities eligible for participation that obtain FSA approvals such as BI, KPEI, PEI, etc. That said, KSEI imposes some operational requirements for its participants. KSEI requires that participants meet specific legal criteria drafted by KSEI into the participant agreement. Due to legal constraint, KSEI does not currently allow other foreign market infrastructures and, in some cases, service providers to act as participants.</p>	<p>Semua pialang atau bank kustodian yang mendapatkan izin berdasarkan peraturan OJK dapat menjadi anggota KSEI. Ada juga entitas lain yang berhak ikut serta yang memperoleh persetujuan OJK seperti BI, KPEI, PEI, dll. KSEI memberlakukan beberapa persyaratan operasional bagi pemakai jasanya. KSEI mengharuskan pemakai jasa memenuhi kriteria hukum tertentu yang disusun oleh KSEI ke dalam perjanjian peserta. Karena kendala hukum, KSEI saat ini tidak mengizinkan infrastruktur pasar luar negeri lainnya dan, dalam beberapa kasus penyedia jasa bertindak sebagai pemakai jasa.</p>
<p>KSEI does not require that participants meet minimum financial criteria specific to their role in KSEI and what risks they may introduce into the system. Instead, market participants must meet specific requirements drawn by regulators and/or documented in the law.</p>	<p>KSEI tidak mengharuskan peserta memenuhi kriteria keuangan minimum khusus untuk peran perusahaan tersebut di KSEI dan risiko apa yang mungkin ditimbulkan oleh Perusahaan tersebut ke dalam sistem. Sebaliknya, pelaku pasar harus memenuhi persyaratan khusus yang dibuat oleh regulator dan/atau diatur dalam undang-undang.</p>
<p>KSEI is technically a Self-Regulating Organisation (SRO) but only from November 2014, it has been able to enforce their regulations. In late November of that year the OJK approved regulation that grants KSEI the powers to conduct ongoing surveillance of</p>	<p>KSEI secara teknis merupakan <i>Self-Regulatory Organization</i> (SRO). Namun, pada November 2014 KSEI baru dapat menegakkan peraturan kepada pemakai jasanya. Pada akhir November 2014, OJK menyetujui peraturan yang memberikan wewenang kepada KSEI untuk melakukan pengawasan berkelanjutan</p>

participants and impose sanctions if these fail to comply with KSEI rules.

terhadap peserta dan memberikan sanksi jika tidak mematuhi aturan KSEI.

Principle 19: Tiered Participation

An FMI should identify, monitor, and manage the material risks to the FMI arising from tiered participation arrangements.

LJK harus mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko material terhadap LJK yang timbul dari pengaturan partisipasi berjenjang.

Principle 19 is not applicable to KSEI.

Prinsip 19 tidak berlaku di KSEI.

Principle 20: FMI Links

An FMI that establishes a link with one or more FMIs should identify, monitor, and manage link-related risks.

LJK yang menjalin hubungan dengan satu atau lebih LJK harus mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko terkait tautan.

Principle Summary:	Ringkasan Prinsip:
<p>KSEI does not have cross-border links in place in place at the moment since there is no cross-border FMI approved by OJK (FSA) as KSEI participant. However, it does have a link with BI for the settlement of government bonds.. This link has a well-founded legal basis supported by contractual arrangements which include operating rules for participation in the FMI.</p>	<p>KSEI belum memiliki <i>cross-border links</i> saat ini karena belum ada LJK lintas negara yang telah disetujui oleh OJK sebagai partisipan KSEI. Adapun KSEI memiliki hubungan dengan BI dalam rangka penyelesaian transaksi surat berharga negara. Hubungan ini memiliki dasar hukum yang kuat yang didukung oleh pengaturan kontrak yang mencakup aturan operasional untuk partisipasi dalam LJK.</p>
<p>KSEI holds only client assets in an omnibus account segregated from its own assets, hence protected from the insolvency of KSEI as a sub-registry. Reconciliations of securities balances with sub-registry records are performed daily and monthly.</p>	<p>KSEI hanya menyimpan aset klien dalam rekening omnibus yang dipisahkan dari asetnya sendiri, sehingga terlindungi dari kebangkrutan KSEI sebagai <i>sub-registry</i>. Rekonsiliasi saldo surat berharga dengan pencatatan <i>sub-registry</i> dilakukan secara harian dan bulanan.</p>

Principle 21: Efficiency and Effectiveness

An FMI should be efficient and effective in meeting the requirements of its participants and the markets it serves.

LJK harus efisien dan efektif dalam memenuhi persyaratan pemakai jasa dan pasar yang dilayaninya.

<p>Principle Summary:</p> <p>KSEI's system design took into account the needs of Indonesian market participants in relation to depository and settlement arrangements, operating structure, delivery systems and technologies. Currently, KSEI relies on customer surveys/questionnaires, which are conducted annually, to assess whether it continues to meet the requirements and needs of the market and any interested party. KSEI also has established working groups which regularly discuss regarding KSEI's initiatives and gather information regarding operational matters.</p> <p>KSEI has set objectives and goals in terms of effectiveness of its operations. KSEI's vision is to become a reliable central depository and be regionally competitive. To achieve these goals, KSEI uses the analysis of metrics and tools such as KPIs, customer satisfaction index, compliance to international standards such as ISO and PFMI.</p>	<p>Ringkasan Prinsip:</p> <p>Desain sistem KSEI mempertimbangkan kebutuhan pelaku pasar Indonesia terkait dengan pengaturan penyimpanan dan penyelesaian, struktur operasional, sistem pengiriman dan teknologi. Saat ini, KSEI mengandalkan survei/kuesioner pemakai jasa yang dilakukan setiap tahun untuk menilai apakah tetap memenuhi persyaratan dan kebutuhan pasar dan pihak yang berkepentingan. KSEI juga telah membentuk kelompok kerja yang secara rutin membahas inisiatif KSEI dan mengumpulkan informasi mengenai hal-hal operasional.</p> <p>KSEI telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam hal efektivitas operasionalnya. Visi KSEI adalah menjadi kustodian sentral yang handal dan berdaya saing regional. Untuk mencapai tujuan tersebut, KSEI menggunakan analisis metrik dan alat seperti KPI, indeks kepuasan pelanggan, kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO dan PFMI.</p>
--	---

Principle 22: Communication Procedures and Standards

An FMI should use, or at a minimum accommodate, relevant internationally accepted communication procedures and standards in order to facilitate efficient payment, clearing, settlement, and recording.

LJK harus menggunakan, atau setidaknya mengakomodasi, prosedur dan standar komunikasi yang diterima secara internasional yang relevan untuk memfasilitasi pembayaran, kliring, penyelesaian, dan pencatatan yang efisien.

<p>Principle Summary:</p> <p>Participants communicate with KSEI systems via an interface, by uploading files, or by using real-time interface. Alternatively, participants can contact KSEI via emails, telephone or regular mail. However, KSEI support only the MT564 message for corporate action notifications. This is mostly used by custodian banks.</p>	<p>Ringkasan Prinsip:</p> <p>Pemakai jasa berkomunikasi dengan sistem KSEI melalui sistem antarmuka, mengunggah file, atau menggunakan <i>real-time interface</i>. Peserta dapat menghubungi KSEI melalui email, telepon atau surat biasa. Namun, KSEI hanya mendukung pesan MT564 untuk notifikasi tindakakn korporasi, yang banyak digunakan oleh bank kustodian.</p>
---	---

Principle 23: Disclosure of Rules, Key Procedures and Market Data

An FMI should have clear and comprehensive rules and procedures and should provide sufficient information to enable participants to have an accurate understanding of the risks, fees, and other material costs they incur by participating in the FMI. All relevant rules and key procedures should be publicly disclosed.

LJK harus memiliki aturan dan prosedur yang jelas dan komprehensif dan harus memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan peserta memiliki pemahaman yang akurat tentang risiko, biaya, dan biaya material lainnya yang mereka keluarkan dengan berpartisipasi dalam LJK. Semua aturan dan prosedur utama yang relevan harus diungkapkan kepada publik.

<p>Principle Summary</p> <p>KSEI is transparent in its publication of rules and procedures related to its services and structure, and has a pro-active approach to ensuring market participants are fully conversant with new or amended rules via an open ‘socialisation’ policy. Information related to other areas such as fee structures and statistical data is accessible on KSEI’s official website.</p>	<p>Ringkasan Prinsip</p> <p>KSEI transparan dalam mempublikasikan aturan dan prosedur terkait layanan dan strukturnya, dan memiliki pendekatan proaktif untuk memastikan pelaku pasar sepenuhnya memahami aturan baru atau yang diubah melalui kebijakan sosialisasi terbuka. Informasi terkait bidang lain seperti struktur biaya dan data statistik dapat diakses di situs resmi KSEI.</p>
---	--

Principle 24: Disclosure of market data by trade repositories

A TR should provide timely and accurate data to relevant authorities and the public in line with their respective needs.

Repositori perdagangan harus menyediakan data yang tepat waktu dan akurat kepada otoritas terkait dan publik sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.

Principle 24 is not applicable to KSEI.

Prinsip 24 tidak berlaku di KSEI.